

BAB II

TINJAUAN GEDUNG DPR KULON PROGO DAN TINJAUAN TEORITIS CITRA BANGUNAN

2.1 Tinjauan Studi Bangunan Gedung DPR

2.1.1 Gedung DPRD sebagai Wadah Aktifitas Kegiatan DPR

2.1.1.1 Pengertian DPRD

Pemerintah Daerah Tingkat II adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang menyelenggarakan pemerintahan daerah dengan dibantu Sekretariat Daerah dan Dinas-Dinas Daerah.⁹ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah unsur Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat(1) Undang-undang No.5 Tahun 1974, yang bertugas bersama Bupati Kepala Daerah menetapkan kebijaksanaan umum Pemerintahan Daerah.¹⁰ Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dan DPRD sebagai pemegang kekuasaan Legislatif, dibentuk oleh staf administrasi serta Dinas-dinas Daerah yang bersama-sama menjalankan fungsi pemerintah daerah antara lain :¹¹

1. Fungsi Keamanan dan Ketertiban,
2. Fungsi Kemakmuran dan Kesejahteraan,
3. Fungsi Administrasi

2.1.1.2 Tugas dan Wewenang DPR

Tugas Dewan Perwakilan Daerah adalah menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah Daerah sebagai dasar dari pelaksanaan fungsi DPR menurut ketentuan Pasal 13 ayat (1) UU RI No. 5 Tahun 1974 yang antara lain :

⁹ Pasal 5 UU RI No. 5 Tahun 1974

¹⁰ Ibid

¹¹ Penjelasan UU RI No. 5 Tahun 1974

1. Bersama-sama Bupati Kepala Daerah menetapkan peraturan daerah
2. Bersama-sama Bupati Kepala Daerah menyusun Anggaran Pendapatan Daerah.
3. Bersama-sama Bupati Kepala Daerah melaksanakan peraturan perundang-undangan yang wewenang pelaksanaanya ditugaskan kepada Kepala Daerah.
4. Menjalin pelaksanaan kerjasama dengan Bupati Kepala Daerah.

Wewenang dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan pada Undang-Undang Dasar 1945 setelah Amandemen Kedua Tahun 2000 pasal 20A ayat 1 menyatakan Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi Legislatif, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.¹² Dan Penjelasan Pasal 23 bahwa Dewan memiliki hak *Begrooting* yang mempunyai wewenang mengontrol pemerintah, dalam hal ini Dewan menetapkan pendapatan dan belanja sehingga kedudukannya lebih kuat dari pada pemerintah.¹³

Hubungan kerja antara tiga faktor yaitu DPRD dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat merupakan faktor penentu letak bangunan dimana fungsi bangunan harus dapat merespon hubungan yang baik antara dua instansi pemerintah dan masyarakat dalam kaitan wewenang DPRD sebagai pengontrol jalannya pemerintahan daerah dan tugas DPRD sebagai penyalur aspirasi rakyat yang disesuaikan dengan meletakkan ruang fungsi pengguna sesuai dengan tugas dan wewenang DPRD yaitu meletakkan ruang publik dan semi publik di area yang paling dekat dengan pencapaian bangunan sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih dapat dioptimalkan dan perletakan ruang privat yang dapat mendukung aktifitas kerja serta ruang servis yang dapat melingkupi ruang-ruang lainnya sebagai fungsi pendukung dan pelayanan.

2.1.1.3 Kegiatan Pada Gedung DPRD

Kegiatan yang diwadahi dalam bangunan Gedung DPRD Kulon Progo meliputi beberapa kegiatan yaitu kegiatan yang bersifat publik, semi publik, privat dan kegiatan servis yang dikelompokkan dalam dua badan tugas antara lain :

¹² Tim, *Undang-Undang Dasar 1945 setelah Amandemen Kedua 2000*, Pustaka Setia, Bandung, 2001, hal 19

¹³ Ibid, hal 41

1. Kegiatan yang bersifat Publik (Umum)

Kegiatan utama anggota DPRD meliputi kegiatan yang bersifat publik atau kegiatan umum yang berhubungan dengan unsur masyarakat, pemerintah atau badan lain seperti:

a. Pelayanan pada kegiatan demonstrasi

Kegiatan ini merupakan kegiatan kerja yang sifatnya berkala dengan jenjang waktu tertentu atau tidak pasti, dalam hal ini pelaku utama dari unsur masyarakat yang di layani oleh anggota Dewan Legislatif yang merupakan kegiatan penyampaian pendapat atau protes yang disampaikan oleh kelompok tertentu dari masyarakat.

Karakter dari kegiatan ini bersifat publik/ umum sehingga dalam perancangan ruang kerja hendaklah mempertimbangkan kualitas dan kuantitas ruang sebagai wadah aktifitas berupa *Hall dan ruang penyampaian pendapat*, dengan pencapaian yang mudah dan jelas.

b. Sidang Paripurna

Kegiatan ini merupakan aktifitas yang sifatnya rutin- tidak rutin, yaitu kegiatannya tidak memiliki ketepatan waktu/ jadwal yang jelas yang dinamakan sidang paripurna dan sidang tidak tetap yang disebut sidang khusus dewan. Kegiatan persidangan dilakukan di *Ruang Sidang Paripurna* dengan kegiatan antara lain :

- Sidang Umum Paripurna,

Adalah sidang dewan legislative yang diadakan dalam pembentukan RAPBD dan penetapan APBD, penetapan Peraturan Daerah (Perda), pertanggung jawaban Bupati, sidang pengajuan proyek Pemerintah Daerah dan sebagainya.

- Sidang Khusus Paripurna

Sidang yang diadakan dalam memecahkan masalah khusus daerah dari masyarakat sampai pemerintah seperti sidang tanggapan dari pengajuan pendapat/ orasi oleh masyarakat melalui demonstrasi atau oleh kelompok masyarakat melalui penyampaian pendapat.

c. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung adalah aktifitas yang dilakukan pada saat proses persidangan diadakan meliputi persiapan persidangan sampai akhir/ penutup persidangan. Dalam kegiatan ini memiliki aktifitas yang kompleks dari pelaku (masyarakat, pemerintah eksekutif, anggota dewan maupun pers) dengan kebutuhan ruang antar lain :

- Parkir
- Lobby dan ruang informasi

2. Kegiatan yang bersifat semi publik

a. Kunjungan

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang aktifitasnya berada diluar Gedung DPRD, hanya saja dalam pelaksanaannya membutuhkan sarana antara lain ***Ruang Transit dan Garasi (ruang kendaraan)*** sebagai wadah prasarana penunjang.

b. Kegiatan Sidang

Kegiatan ini merupakan kegiatan intern yang umum dan dapat dihadiri oleh unsur pers, yang antara lain berupa :

- Sidang Komisi
- Sidang Fraksi
- Sidang Risalah

c. Wawancara

Yaitu kegiatan wawancara yang dilakukan unsur masyarakat tertentu ataupun pihak pers. Kegiatan ini bersifat semi publik sehingga membutuhkan karakter ruang yang khusus seperti *Ruang Pers dan Ruang Tamu*.

3. Kegiatan yang bersifat Privat

Yaitu kegiatan yang meliputi aktifitas rutin kerja bagian sekretariat Gedung DPRD dan anggota DPRD sendiri yang pada pelaksanaannya dibagi dalam jabatan-jabatan tugas dengan kebutuhan ruang yang disesuaikan menurut jabatan tersebut antara lain :

- a. Ketua DPRD
- b. Wakil Ketua Dewan
- c. Anggota Dewan

Yaitu keseluruhan dari elemen fraksi-fraksi dalam DPRD yang dibagi dalam tugas-tugas :

- Anggota Komisi
- Anggota Fraksi

4. Kegiatan yang bersifat servis

Adalah kegiatan pelayanan dari kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat dilakukan secara pribadi/ privasi tinggi atau dibantu oleh petugas, kegiatan ini membutuhkan ruang-ruang seperti :

- a. Lavatori/ KM/WC
- b. Mushola
- c. Lapangan Olah Raga
- d. Perpustakaan
- e. Kafetaria

2.1.2 Kebutuhan Ruang pada Gedung DPRD

Pada Prinsipnya pemenuhan ruang diharapkan dapat menciptakan ruang-ruang yang dapat mendukung aktifitas pengguna baik itu dari segi kualitatif maupun kuantitatif yang dapat mewadahi manusia dan prasarana kerja seperti peralatan meliputi ruang gerak pengguna.

➤ Studi Ruang Gedung DPRD

Tabel 2.1 Studi Banding Ruang-Ruang Gedung DPRD

	DPRD Sleman	DPRD Bantul	DPRD DIY
Anggota DPRD			
R. Sidang Paripurna (Pb)	1 Ruang	1 Ruang	1 Ruang
R. Sidang Komisi (SP)	1 Ruang	1 Ruang	1 Ruang
R. Sidang Fraksi (SP)	-	1 Ruang	1 Ruang
R. Ketua (Pv)	1 Ruang	1 Ruang	1 Ruang
R. Wakil Ketua (Pv)	3 Ruang	3 Ruang	3 Ruang
R. Komisi (Pv)	5 Ruang	5 Ruang	5 Ruang
R. Fraksi (Pv)	7 Ruang	6 Ruang	7 Ruang
R. Tamu/ Pers (SP)	2 Ruang	2 Ruang	4 Ruang
R. Transit (SP)	1 Ruang	-	2 Ruang
Lavatori (Sv)	1 Ruang	1 Ruang	1 Ruang
Sekretariat DPRD			
R. Sekretariat (Pv)	1 Ruang	1 Ruang	1 Ruang
R. Rapat Risalah (SP)	-	1 Ruang	1 Ruang
R. Risalah (Pv)	1 Ruang	1 Ruang	1 Ruang
R. Ka.Bag (Pv)	3 Ruang	4 Ruang	7 Ruang
R. Staff/ Karyawan (Pv)	4 Ruang	5 Ruang	9 Ruang
R. Perpustakaan (Sv)	1 Ruang	1 Ruang	1 Ruang
Lavatori (Sv)	1 Ruang	1 Ruang	1 Ruang
Garasi (SP)	2 Ruang	1 Ruang	2 Ruang

Dari data ruang-ruang di gedung DPRD DIY, Sleman, Bantul kelompok peruangan di bagi dalam 2 kelompok Tugas yaitu kelompok *Ruang Anggota DPRD* dan kelompok *Ruang Sekretariat DPRD* yang terdiri dari pengelompokan jenis pengguna ruang yaitu ruang publik, semi public, privat dan servis.

➤ **Kelompok dan Susunan ruang Gedung DPR**

Kebutuhan ruang kantor dapat dihitung dengan menggunakan cara , yakni ruang gerak perorangan x jumlah orang ditambah ruang tambahan untuk sarana penunjang ditambah kebutuhan sirkulasi 15%-20%¹⁴

Tabel 2.2 Kelompok Jenis dan Ruang Gedung DPRD

Jenis Pengguna	Anggota DPRD	Jml	Sl/m ²	Sekretariat DPRD	Jml	Sl/m ²
Publik	R. Sidang Paripurna	1	1,25	Parkir	1	Mbl 12
	Hall	1	1,5	Taman	1	-
	Parkir	2	12			
	Taman	1	-			
Semi Publik	R. Sidang Komisi	1	3	R. Rapat Risalah	1	3
	R. Sidang Fraksi	1	3	R. Tamu	2	2,5
	R. Tamu	2	2,50	Garasi	1	12
	R. Pers	3	2,5			
	R. Transit	1	3			
Privat	R. Ketua	1	30	R. Sekretaris	1	25
	R. Wakil Ketua	3	20	R. Kepala Bagian	6	15
	R. Komisi	5	8	R. Staff	6	6
	R. Fraksi	7	8	R. Karyawan	3	6
				R. Risalah	1	8
Servis	Lavatori	5	3	Lavatori	4	3
	Muhola	1	0,65	Mushola	1	0,65

¹⁴ Ernst Neufert-Sunarto Tjahjadi, *Data Arsitek* jilid I, Erlangga, Jakarta, 1997, hal 11

Perpustakaan	1	0,8
--------------	---	-----

*) SI/m^2 (standart luas ruang perorang plus perabot dan sirkulasi untuk perkantoran)¹⁵

Dalam perancangan Gedung DPRD Kulon Progo ruang-ruang yang ada disesuaikan dengan kebutuhan dan fungsi yang ada dengan standar luas ruang sesuai dengan aturan yang ada.

2.2 Tinjauan Gedung DPRD Kulon Progo

2.2.1 Struktur dan Unsur Pelaku Dalam Gedung DPRD Kulon Progo

Dalam Struktur Organisasi Pelaku di Gedung DPRD Kulon Progo dibagi atas kerangka kerja yang terdiri dari :

A. Struktur Keanggotaan DPRD Kulon Progo

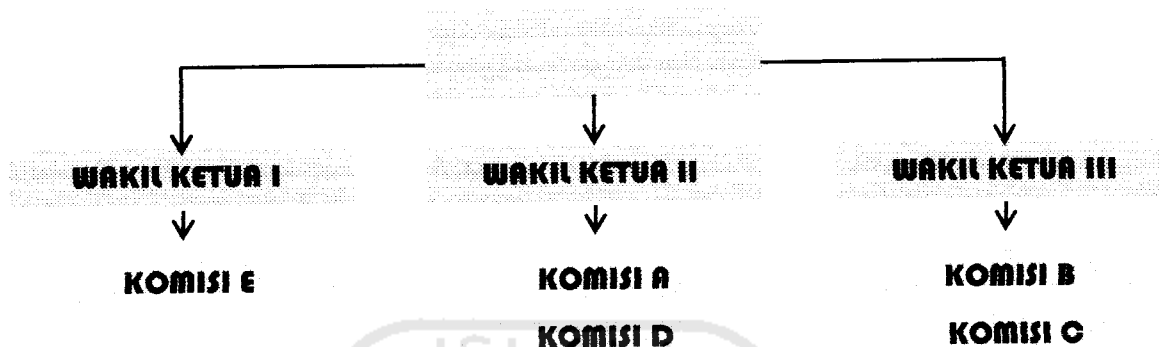
Unsur pelaku dalam keanggotaan DPRD Kulon Progo terdiri dari anggota fraksi ABRI, fraksi Karya Pembangunan (Golkar), fraksi Persatuan Pembangunan (PPP), fraksi PDI Perjuangan, fraksi Kebangkitan Bangsa (PKB), dan fraksi Amanat Nasional (PAN) yang diwakili oleh 40 anggota Legislatif dan dibagi atas 5 bidang kerja Komisi yang dibawah oleh Ketua Komisi, Wakil Ketua Komisi, dan sisanya sebagai anggota dengan bidang tugas sebagai berikut¹⁶:

1. Komisi A membawahi bidang Pemerintahan (7 anggota)
2. Komisi B membawahi bidang Perekonomian (7 anggota)
3. Komisi C membawahi bidang Keuangan (8 anggota)
4. Komisi D membawahi bidang Pembangunan (7 anggota)
5. Komisi E membawahi bidang Kesejahteraan Rakyat (7 anggota)

Adapun dalam kepengurusannya dipimpin oleh satu ketua DPRD dengan tiga wakil ketua yang berfungsi sebagai koordinator Komisi.

¹⁵ Ernst Neufert-Sunarto Tjahjadi, *Data Arsitek* jilid I, Erlangga, Jakarta, 1997

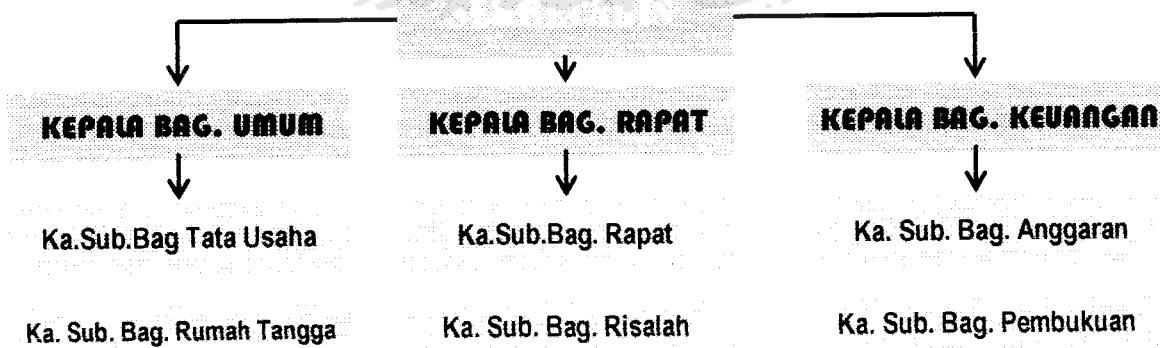
¹⁶ Tim, *Bagan Struktur Keanggotaan DPRD Tk II Kulon Progo*, DPRD Kulon Progo



Gbr. 2.1 Struktur Organisasi DPRD Kulon Progo

B. Struktur Sekretariat DPRD Kulon Progo

Sekretariat DPRD Kulon Progo adalah unsur pelaku sebagai pengelola kegiatan anggota Legislatif yang bertanggung jawab pada pelaksanaan kegiatan harian di Gedung DPRD Kulon Progo. Kedudukan sekretariat DPRD ada dibawah pengelolaan Pemerintahan Eksekutif dengan struktur pembagian tugas sebagai berikut :



Gbr. 2.2 Struktur Sekretariat DPRD Kulon Progo

Keterangan jabatan dalam pembagian tugas adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Struktur Staff dan Karyawan Sekretariat DPRD KP

Urusan Surat Masuk	Tunis Komisi (5 Staff)	Pemegang Kas
Urusan Surat Keluar	Urusan Administrasi	Pembantu Pemegang Kas
Urusan Perpust dan Dok.		
Urusan Kepegawaian	Bendaharawan Gaji	Urusan Kendaraan
Penerima Tamu, Surat Masuk	Pembuat Daftar Gaji	Urusan Kebersihan Kantor
Penjaga Telepon, Ajudan Ketua		Urusan Ketertiban
Penjaga Sound Sistem	Notulis (2 Staff)	Pengemudi (4 karyawan)
Pengantar Surat		

2.3 Tinjauan Ekspresi Bangunan

2.3.1 Aspek Guna dan Citra

Guna merupakan fungsi dimana ruang-ruang menyesuaikan dengan kegunaan dan fungsi dari aktifitas yang diwadahi yang menjadi pembentuk citra atau kesan bangunan, dan sebaliknya citra sebagai ekspresi kesan bangunan dari kegiatan yang diwadahi merupakan perwujudan dari fungsi bangunan itu sendiri. Sehingga citra yang terbentuk bukan hanya berupa ekspresi atau simbol saja tetapi merupakan kesan yang timbul karena pengaruh penerapan ruang dan bangunan atas fungsi.

2.3.2 Ekspresi Citra Keterbukaan dan Kewibawaan

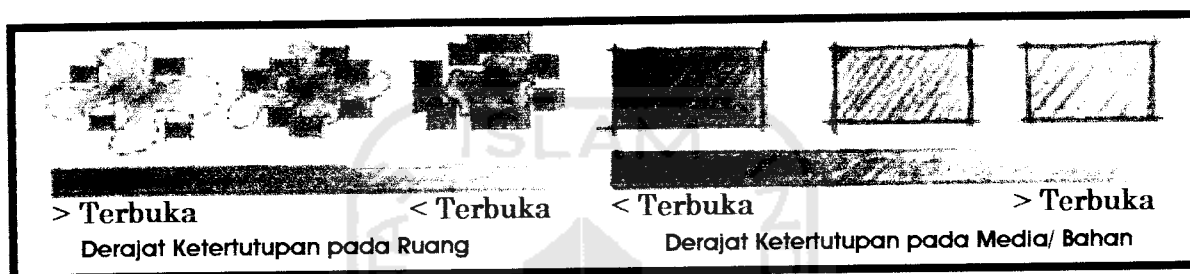
Dalam merencanakan suatu bangunan diperlukan pengungkapan suatu ekspresi untuk mewujudkan penampilan bangunan agar dapat dimengerti pesan-pesan dan makna yang akan diperlihatkan, ekspresi sendiri dalam arsitektur seperti bahasa yang identik dengan komunikasi.¹⁷ Pengungkapan ekspresi pada sebuah bangunan merupakan suatu bahasa arsitektural yaitu komunikasi secara tidak langsung yang diungkapkan oleh

¹⁷ Frederick A. Jules, *Dasar-Dasar Persepsi untuk Perancangan Arsitektur*, Introdution of Arsitek, 1994, hal 323

bangunan kepada penggunanya.¹⁸ oleh sebab itu dalam merencanakan Gedung DPRD Kulon Progo perlu adanya kesan dan citra yang mengkomunikasikan visual bangunan sebagai wadah yang merespon pemakainya dalam kesan wibawa dan terbuka serta kontekstual pada arsitektur daerah yang terbentuk melalui fungsi tata ruangnya.

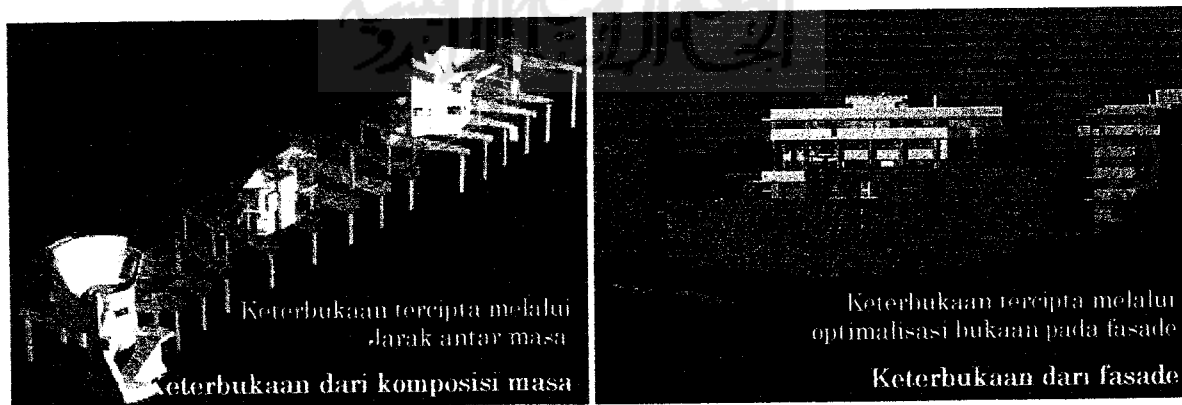
2.3.2.1 Kesan Keterbukaan

Kata Keterbukaan merupakan kata sifat dari kosakata terbuka, makna terbuka sendiri identik dengan sesuatu yang bebas tanpa penutup atau penghalang,



Gbr. 2.3 Hirarki Derajat Keterbukaan

Dalam pengertian arsitektur "*terbuka*" dapat diukur dengan derajat keterbukaan secara *hirarki* pada media atau masa pembentuk dan komposisi ruang untuk menimbulkan perasaan tertentu pada pemakai¹⁹. Pada media/ bahan, diukur melalui kepadatan unsur pembentuknya dimana unsur-unsur yang semakin rapat menghasilkan media yang semakin tertutup. Sedangkan dalam *komposisi* pada ruang, ketertutupan dipengaruhi oleh sudut pembentuk dimana sudut yang tertutup akan menghasilkan ruang yang semakin tertutup.



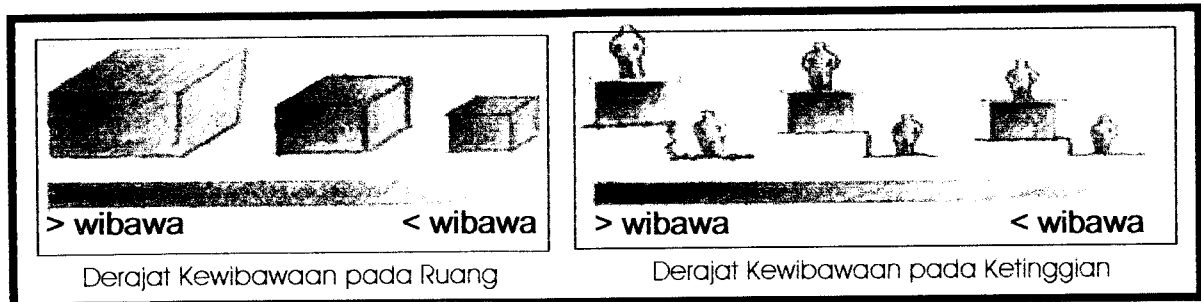
Gbr. 2.4 Contoh Bangunan yang Berkesan Terbuka

¹⁸ Wiryono. Ir, Diktat Teori Arsitektur, Universitas Islam Indonesia. 1996

¹⁹ Fajriyanto. Ir, MTP, Diktat Perencanaan Tapak II, Universitas Islam Indonesia, 1995

2.3.2.2 Kesan Kewibawaan

Kata Kewibawaan merupakan kata sifat dari kata wibawa, kewibawaan sendiri identik dengan sesuatu yang kuat yang memiliki kekuasaan ataupun pengaruh.



Gbr. 2.5 Skala pada Derajat Kewibawaan

Dalam arsitektur "*Kewibawaan*" dapat diperlihatkan melalui derajat dimensi ruang dan perletakan. Pada derajat ruang, *skala* yang memiliki tinggi dan lebar lebih besar akan memiliki nilai yang cenderung berwibawa, sedangkan pada *hirarki* derajat perletakan, sesuatu yang memiliki letak lebih tinggi akan memiliki nilai yang cenderung berwibawa. Selain itu kewibawaan dapat ditunjukkan melalui rangka yang rigid, kokoh dan kuat serta ornamen bangunan yang rumit dan indah yang melambangkan kekuatan dan penekanan keindahan pada sesuatu yang ditinggikan atau diwibawakan.



Gbr. 2.6 Contoh Bangunan yang Berkesan Wibawa

Kedua kosakata diatas merupakan suatu arti yang abstrak karena berupa kata sifat yang menjelaskan karakter benda, dalam arti bahasa makna tersebut masih mungkin untuk didefinisikan melalui sinonim ataupun pendekatan makna, akan tetapi untuk diterapkan

kedalam bentuk arsitektural bangunan kesan tersebut harus memiliki kriteria yang mempunyai batasan arti. Oleh sebab itu dalam memberikan batasan arti diperlukan standar pendekatan dari suatu benda yang memiliki persamaan makna atau maksud. Sebagai perwujudannya dilakukan dengan menuangkan ekspresi yang dipadu dengan kesan atau imej objek yang diwadahi seperti citra Keterbukaan dan Kewibawaan yang menggambarkan aplikasi dari tugas dan wewenang DPR, yang pada penerapannya dilakukan dengan pendekatan pada bangunan tradisional Kulon Progo.

Adapun faktor penentu Kewibawaan dan Keterbukaan ditentukan oleh :

1. Komposisi

2. Hirarki

3. Skala

Yaitu bagaimana kesan kewibawaan dan keterbukaan tercipta melalui komposisi, hirarki, dan skala yang disesuaikan dengan unsur-unsur masa, ruang, bentuk bangunan atau fasade serta sirkulasi yang disesuaikan dengan keterkaitan antara keduanya. Hasil kesesuaian diatas dijadikan pedoman dalam menganalisa unsur-unsur yang mempengaruhi kesan terbuka dan wibawa yang dapat diterapkan dalam perancangan bangunan Gedung DPRD Kulon Progo.

2.3.3 Penampilan pada Gedung DPRD

Citra atau Kesan dapat terbaca dari ekspresi penampilan bangunan sehingga tinjauan pada aspek-aspek penampilan bangunan haruslah menjadi faktor penting dalam perencanaan dan perancangan arsitektur, adapun unsur yang membentuk penampilan bangunan antara lain :

1. Bentuk

Bentuk terkait dengan masa, dan bentuk-bentuk dasar. Organisasi bentuk keseluruhan akan lebih mengekspresikan isinya, sehingga komunikasi dari sang arsitek terhadap

perasaan dari bentuk bangunan akan semakin tegas dan jelas.²⁰ Setiap bentuk mempunyai karakter yang berbeda sehingga akan berpengaruh terhadap persepsi yang ditimbulkan. Fungsi yang diekspresikan dengan jelas akan menimbulkan karakter, sedangkan lekukan vertikal dan horizontal menimbulkan kesan perspektif.²¹

2.Fasade

Fasade merupakan wujud atau rupa bangunan sebagai unsur pembentuk citra bangunan. Menurut Ishar HK yang termasuk dalam fasade adalah²² :

- a. **Karakter**, jika semua bangunan dibuat dengan ukuran dan menurut fungsinya, maka dengan sendirinya terjadi suatu pengelompokan bentuk dan ukuran menurut jenisnya. Masing-masing mempunyai suatu ciri atau karakter tersendiri, misalnya karena ukuran jendela, tinggi plafond an sebagainya
- b. **Gaya**, dalam arsitektur gaya berarti suatu cara membangun atau merancang secara berbeda dengan yang lain atau bisa juga sesuai dengan bangunan yang ada dilingkungannya. Gaya dapat terjadi karena mengikuti sejarah suatu jaman atau kebudayaan, pemakaian bahan, iklim, detail, dan pribadi arsitek
- c. **Warna**, peranan warna dalam arsitektur dipakai untuk memperkuat bentuk. Warna memberikan ekspresi kepada pikiran atau jiwa manusia yang melihatnya, oleh sebab itu warna sedikit banyak menentukan karakter.

3.Material

Pemilihan dan pengolahan bahan akan mempengaruhi kesan pandangan antara ekspresi bahan dan pengamatanya. Karakter dan kesan dari bahan bangunan dapat berbeda, tergantung dari cara pengolahan bahan hingga dapat digunakan. Kesan material yang didapat adalah kesan keseluruhan yang merupakan perpaduan bahan atau kesan material yang paling menonjol.

²⁰ Antoniades, Anthony C. *Persepsi in Architecture*, Van Raynold, London, 1992

²¹ Ishar, HK, *Pedoman Umum Merancang Bangunan*, Gramedia, Jakarta, 1992

²² Ibid

4. Struktur

Struktur memegang peranan yang penting dalam memberikan kesan pada bangunan. Hal ini berkaitan dengan pemilihan bahan yang digunakan, karena sifat bahan berkaitan dengan sistem strukturnya. Misalnya beton baik dalam menahan gaya tekan, sedangkan baja baik untuk menahan gaya tarik. Seiring kemajuan teknologi, sistem struktur pun sudah jauh berkembang, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana memilih struktur dan bahan yang sesuai dengan fungsi yang dikehendaki dan menghasilkan kesan yang diinginkan.²³

5. Visual Bangunan

Penentuan aspek visual erat kaitannya dengan elemen-elemen dan prinsip-prinsip penyusunan tata ruang, yaitu :

- a. Proporsis
- b. Komposisi, susunan atau aturan antar komponen ruang
- c. Keseimbangan
- d. Irama, keteraturan dengan irama menunjukkan dinamis
- e. Keselarasan, diungkapkan dengan bentuk, warna dan tekstur
- f. Kontras ditunjukkan dengan bentuk, garis, warna, tekstur, vertikal, dan horizontal.

6. Warna dan Tekstur

Warna dapat dikatakan merupakan kualitas dari cahaya yang dipantulkan dari suatu permukaan atau dari sumber cahaya. Persepsi cahaya bervariasi tergantung pada kondisi-kondisi yang berpengaruh, yaitu²⁴ :

- a. Tipe penerangan, penerangan alami atau buatan
- b. Jenis, pola dan tekstur permukaan
- c. Perhubungan warna dari figure dan latar belakang dalam situasi tertentu.

²³ Suwondo B Sutedjo, *Presepsi Bentuk dan Konsep Arsitektur*, P: 58, Djambatan, Jakarta, 1986

²⁴ Isaac ARG, *Pendekatan kepada Perancangan Arsitektur*, P: 45, Intermatra, Bandung, 1986

Unsur-unsur penampilan bangunan di atas merupakan faktor yang menjadi pembentuk ekspresi bangunan yang selanjutnya disesuaikan dengan nilai-nilai dari makna keterbukaan dan kewibawaan. Hal ini dilakukan dengan menyesuaikan unsur penampilan yang dapat menerima nilai-nilai terbuka dan wibawa dengan faktor-faktor dasar perancangan bangunan.

2.4 Tinjauan Arsitektur Tradisional Kulon Progo

2.4.1 Joglo sebagai Identitas Bangunan Tradisional Kulon Progo

Arsitektur tradisional Jawa merupakan bentuk bangunan tradisional yang banyak digunakan dan menjadi pakem masyarakat Jawa sebagai identitas wilayah, khususnya wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. Menyinggung tentang bentuk bangunan tradisional Jawa sendiri ada tiga pengelompokan wilayah spesifik di Jawa Tengah diantaranya²⁵ :

- Wilayah pantai utara : meliputi daerah Demak, Pati, Kudus, Jepara, Rembang, dengan keunikan atap Bencu, Bekuk-lulang dan Kosolnya
- Wilayah Selatan : meliputi daerah eks Karisidenan Kedu dan Banyumas, dengan kekhasan Srotongan, Trojagan dan Tikelannya
- Wilayah Tengah : meliputi daerah eks Karisidenan Surakarta dan sekitarnya termasuk Jogjakarta dengan kekhasan pada atap joglo.

Melihat klasifikasi wilayah pada bentuk bangunan Tradisional Jawa diatas, bentuk Joglo merupakan bangunan yang sesuai untuk diterapkan pada Gedung DPRD Kulon Progo karena sesuai dengan daerah pengelompokan.

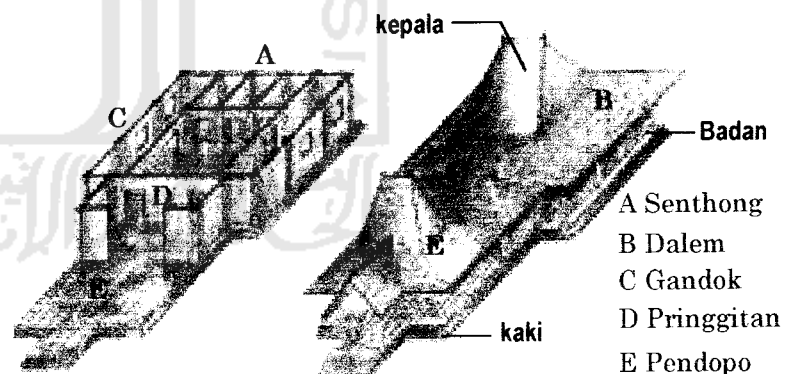
Adapun pendekatan Joglo sebagai *Identitas wilayah* dapat diterapkan melalui transformasi bentuk dengan metode *simbolisasi, metafora, analogi* serta *preseden* dengan penyesuaian metode yang dapat mendukung terciptanya citra dan kesan pada visual bangunan dengan arsitektur baru yang tetap kontekstual pada arsitektur tradisional. Pada

²⁵ Atmadi, Purnomo, Prof. Dr. Ir, *Apa yang Terjadi Pada Arsitektur Jawa*, Lembaga Javanologi, 1984

penerapannya kontekstual bangunan tradisional dilakukan dengan transformasi yang menggunakan metode simbolisasi yaitu, mensimbolkan salah satu ciri utama bangunan tradisional Joglo dengan pendekatan preseden atau persamaan bentuk bangunan dengan bangunan lain yang dapat dilakukan dengan persamaan bentuk/ raut, warna, ukuran, lokasi/kedekatan atau arah²⁶, serta metode analogi yaitu penerapan bentuk yang menyerupai raut dari yang lainnya dengan perbedaan pada bentuk bahasa, ukuran, lokasi atau peningkatan tak teratur dari perubahan yang dapat mendekati keserupaan.²⁷ yang diterapkan dengan mentransformasikan makna ruang bangunan Joglo ke dalam bangunan Gedung DPRD Kulon Progo dengan penerapan pada persamaan fungsi secara umum, misal ruang pendopo sebagai wadah aktifitas pertemuan yang bersifat publik diaplikasikan dalam ruang-ruang publik, atau ruang lain yang memiliki fungsi sama untuk diterapkan pada bangunan Gedung DPRD Kulon Progo.

2.4.2 Fungsi, Karakter dan Makna Ruang pada Bangunan Joglo

Arsitektur Jawa mirip dengan jasad hidup yang tumbuh dan berkembang sejalan dengan perkembangan hidup penghuninya.²⁸ sehingga ruang-ruang pada bangunan Joglo antara satu bangunan dengan bangunan lainnya banyak perbedaannya, hal ini tergantung dari kebutuhan ruang yang selalu berubah



Gbr 2.7 Denah dan Ruang Joglo

(berkembang-menyusut). Akan tetapi bangunan Joglo memiliki pakem dasar dalam pembentukan ruang, susunan dasar ruangan pada bangunan Joglo biasanya dibagi atas tiga

²⁶ Isaac-ARG, *Pendekatan kepada Perancangan Arsitektur*. Intermatra, Bandung, 1986, hal 42

²⁷ Roger H. Clark- Michael Pause, *Preseden dalam Arsitektur*, Intermatra, Bandung, 1986, hal 156

²⁸ Budiarto, Eko, *Percikan Masalah Arsitektur, Perumahan, Perkotaan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1987, hal 15

bagian yaitu ruang *pendopo*, *pringgitan*, *dalem* serta proses organik bangunan Joglo sebagai pengejawantahan tubuh yang terdiri dari *kepala*, *badan* dan *kaki*.

1. Pendopo

Fungsi ruang pendapa adalah sebagai tempat pertemuan yang bersifat umum (contoh: tempat genduri, tempat pertemuan warga secara ritual, social, serta tempat bermain)²⁹

Karakter ruang dari pendopo berbentuk bujur sangkar dengan disangga oleh empat tiang yang disebut saka guru dan tanpa ditutup oleh dinding dengan penampilan terbuka yang dihiasi dengan ornamen.

Makna dari ruang tersebut memberikan kesan sebagai tempat yang terbuka bagi umum/ individu lain (publik) dan bentuk penghormatan/ memuliakan orang lain yang dianalogikan pada ruang publik seperti ruang Hall dan ruang Sidang Paripurna melalui pemaknaan fungsi kegunaan sebagai ruang resmi sekaligus ruang umum bagi masyarakat.

2. Pringgitan

Fungsi ruang pringgitan adalah sebagai tempat pertemuan secara khusus atau tempat untuk mengadakan tontonan wayang.³⁰

Karakter ruang pringgitan terbentuk dari dinding-dinding pembatas dengan dinding tengah bagian depan terbuka.

Makna ruang tersebut memberi kesan bahwa wadah tersebut merupakan daerah yang bersifat khusus (semi publik) tetapi tidak tertutup bagi orang lain yang dianalogikan pada ruang penyampaian pendapat dan ruang-ruang sidang yang bersifat semi publik dengan pemaknaan fungsi ruang pertemuan yang bersifat khusus.

3. Dalem/ Omah Njero

Fungsi dalem adalah sebagai ruang keluarga (prifat) yang terdiri dari senthong kiwo, senthong tengah (patehan) dan senthong tengen.³¹

²⁹ R Ismunandar K, *Joglo Arsitektur Rumah Tradisional Jawa*, Dahara Prize, Semarang, 1990, hal 93

³⁰ Ibid, hal 93

³¹ Ibid, hal 93

Karakter dalam terbentuk sebagai wadah yang tertutup bagi orang lain/ individu lain dengan empat dinding penutup, ruang dalam terdiri dari tiga bagian yaitu *senhong kiwo*, *tengah* dan *tengen*.

Makna ruang dalam memberi kesan pada sebuah wadah khusus yang harus dihormati dengan tidak menyentuh atau memasuki daerah tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yang memberikan pandangan bahwa pemilik memiliki sesuatu yang bersifat pribadi dan tidak boleh diusik atau diganggu orang lain dianalogikan pada ruang kerja sebagai area pribadi.

a. Senthong Kiwo-Tengen

Fungsi *senhong kiwo* dan *tengen* merupakan ruang untuk kepala keluarga dan istrinya, *senhong* yang ada disebelah barat digunakan sebagai ruang tidur suami istri dan pada saat istri melahirkan anak menempati *senhong* sebelah timur sejak bersalin sampai proses menyusui.³²

Karakter ruang ini berada di dalam dalam dengan posisi mengapit *senhong tengah*, ruang ini bersifat sangat pribadi dan tertutup dan kadang fungsi jendela hanya sekedar sebagai simbolik saja karena tidak berhubungan dengan halaman/ luar rumah.

Makna *senhong* yang berada disebelah timur-barat menggambarkan urutan kehidupan manusia dari muda sampai tua yang ditempati berdasar tingkatan usia, hal ini dianalogikan pada ruang anggota DPRD dan ruang Sekretariat dengan tingkat hirarki pada keutamaan jabatan dan kedudukan.

b. Senthong Tengah

Fungsi *senhong tengah* sebagai tempat meditasi atau pertapan dan digunakan sebagai tempat penyimpanan barang-barang berharga/ pusaka.³³

Karakter *senhong Tengah* sangat tertutup untuk orang lain, bahkan terkadang wanita/ istri tidak boleh memasuki ruang ini karena sebagai tempat yang dikeramatkan untuk bertapa dan menyimpan pusaka.

³² Reviyanto Budi Santosa, *Omah Membaca Makna Rumah Jawa*, Yayasan Bentang Budaya, Yogyakarta, 2000, hal 59

³³ Ibid, hal 60

Makna dari ruang ini adalah suatu tempat yang dijunjung tinggi keberadaannya sebagai tempat mulia yang berada ditengah bangunan dianalogikan pada ruang Sidang Risalah sebagai tempat sidang keputusan dari hasil sidang-sidang lainnya.

Selain makna peruangan, ada makna lain yang harus diperhatikan yaitu bentuk bangunan Joglo yang *simetris* sebagai perlambang keseimbangan hidup, *pencapaian* ke dalam pomahan yang diterapkan secara jujur yaitu langsung dan terarah pada bangunan, serta keterbukaan dan rasa kekeluargaan yang tinggi terwujud dalam *membatasi pomahan* dengan elemen alam atau pohon seperti tirsan dan pemaknaan *proses organik* bangunan yang terdiri dari kepala-atap, badan-bangunan atau masa, dan kaki-lantai.

Dalam perancangan Gedung DPRD Kulon Progo tiga ruang dasar dalam membentuk bangunan Joglo diatas ditransformasikan melalui analogi pada ruang-ruang dengan fungsi yang sama.

- a. Pendopo yang bersifat publik ditransformasikan pada ruang yang bersifat publik pula seperti ruang sidang Paripurna, Hall dan sebagainya,
- b. Pringgitan yang bersifat semi publik ditransformasikan pada ruang sidang komisi, fraksi, ruang tamu,pers dan ruang lainnya yang mempunyai sifat semi publik,
- c. Dalem yang terdiri dari gandok (sebagai ruang umum bagi keluarga) ditransformasikan pada ruang staff dan ruang anggota DPR, Senthong Kiwo/ Tengen ditransformasikan pada ruang pimpinan DPRD dan ruang Sekretaris, ruang senthong Tengah ditransformasikan pada ruang sidang Risalah.

2.5 Tinjauan Perancangan Gedung DPRD

2.5.1 Prinsip Dasar Perancangan Gedung DPRD

2.5.1.1 Sirkulasi Pada Gedung DPRD

Sirkulasi pada bangunan perkantoran harus meminimalkan jarak capai antar ruang baik vertikal maupun horisontal dan menciptakan rasa hubungan yang akrab antar ruang.³⁴ oleh sebab itu sirkulasi pada Gedung DPRD Kulon Progo harus dapat memberikan kemudahan dalam pencapaian antar ruang sesuai dengan tingkat hubungan antar fungsi dan ruang.

A. Sirkulasi Ruang Luar

Sirkulasi ruang luar adalah sarana pencapaian antar kelompok ruang/ masa yang dapat diciptakan melalui pencapaian secara *langsung, tersamar*, atau *berputar*. Dalam perancangan Gedung DPRD Kulon Progo kesan Terbuka dan Wibawa juga harus dapat dirasakan pada sirkulasinya. Keterbukaan sirkulasi ruang luar dapat diciptakan dengan menempatkan sirkulasi pencapaian ganda.



Gbr. 2.8 Arah Pencapaian

B. Sirkulasi Ruang Dalam

Sirkulasi ruang dalam adalah sarana pencapaian antar ruang dalam satu masa atau sesuai dengan hubungan ruang yang dicapai secara *linear, radial, spiral, grid* atau *network* dengan pembagian fungsi sirkulasi yaitu *primer* dan *skunder*. Kesan terbuka ditunjukkan pada ruang sirkulasi melalui karakter media penutup, dimana hubungan interaksi dari ruang sirkulasi dengan ruang lainnya akan memberi makna terbuka. Sedang kewibawaan sirkulasi tercipta melalui dimensi dan perletakan.

Sirkulasi ruang luar pada gedung DPRD haruslah dapat memberi jarak capai yang dekat dan jelas terhadap ruang publik agar dapat memudahkan kegiatan pelayanan terhadap masyarakat yaitu dengan pencapaian secara langsung dan penempatan ruang

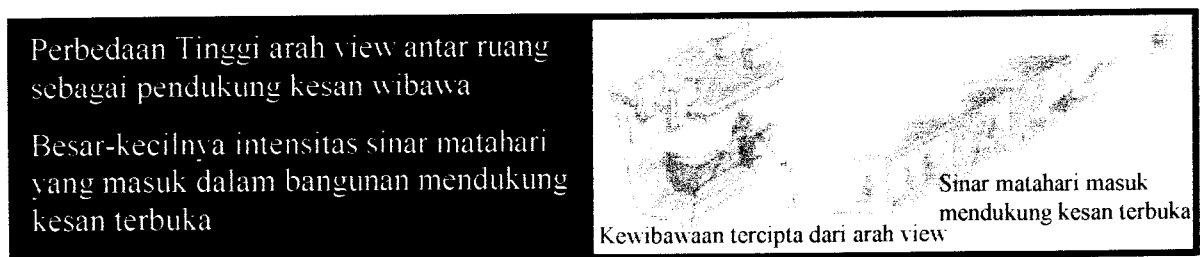
³⁴ Ernst Neufert-Sunarto Tjahjadi, *Data Arsitek* jilid I, Erlangga, Jakarta, 1997, hal 6

publik yang dekat dengan pintu masuk., sedangkan pada sirkulasi ruang dalam juga harus tetap mempertimbangkan jarak capai antar ruang terutama pada ruang-ruang kerja untuk memudahkan proses kegiatan kerja dengan pengaturan hubungan ruang sesuai dengan kedekatan kegiatan yang disusun secara network dalam ruang kerja dan dihubungkan secara terpusat melalui sirkulasi antar ruang.

2.5.1.2 Orientasi Gedung DPRD

Orientasi adalah penempatan bangunan sehingga memperoleh berbagai keuntungan optimal pada site, dalam perancangan gedung perkantoran penampilan bangunan harus satu organisasi antara lingkungan dan bangunannya yang dinyatakan dalam upaya pendekatannya dengan tingkat penerimaan ke/dari publik.³⁵ Faktor-faktor yang mempengaruhi orientasi dan lokasi bangunan adalah³⁶ :

- a. **Cahaya matahari**, yaitu bagaimana memperoleh cahaya sesuai dengan yang diinginkan. Dengan material bangunan yang tidak rapat/ transparan akan memberikan kesan terbuka dari dukungannya cahaya/ pantulan cahaya yang masuk ke dalam ruang.
- b. **Arah Angin**, yaitu bagaimana mengarahkan aliran angin sebagai antisipasi dari beban lateral yang diperoleh bangunan dan juga mengarahkan sirkulasi udara luar dan dalam bangunan. Bukaan serta elemen pengarah angin merupakan unsur yang dapat diolah dengan mengarah pada kesan terbuka dan wibawa.
- c. **View**, yaitu bagaimana memanfaatkan view dari luar ke arah bangunan dan dari dalam keluar bangunan sebagai daya tarik. Perletakan dan penempatan view dapat diarahkan dalam membentuk kesan wibawa melalui perbedaan tinggi.

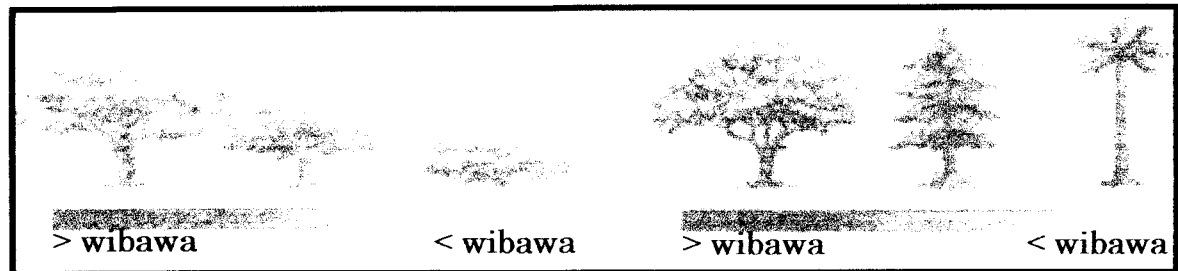


Gbr. 2.9 Orientasi pada View dan Sinar Matahari

³⁵ Ernst Neufert-Sunarto Tjahjadi, *Data Arsitek* jilid I, Erlangga, Jakarta, 1997, hal 6

³⁶ Ir Fajrianto, MTP, Diktat Perencanaan Tapak II, Universitas Islam Indonesia

e. *Landscape*, yaitu bagaimana menata lingkungan luar bangunan sebagai pendukung fungsi dan kesan bangunan yang diinginkan. Penataan landscape dengan memadukan karakter tumbuhan dapat mendukung kesan terbuka dan wibawa.



Gbr. 2.10 Derajat Keterbukaan dan Kewibawaan pada Vegetasi

Orientasi gedung DPRD haruslah mengarah pada lokasi yang terjangkau oleh publik dengan penempatan entrance bangunan yang dapat dilihat dan teridentifikasi oleh publik sedangkan arah angin dan matahari dioptimalkan untuk ruang-ruang kerja dengan pengolahan yang sesuai kebutuhan sekaligus untuk membentuk penampilan visual bangunan seperti penempatan elemen shading yang sesuai dengan fungsinya dan penempatannya yang diolah secara estetik.

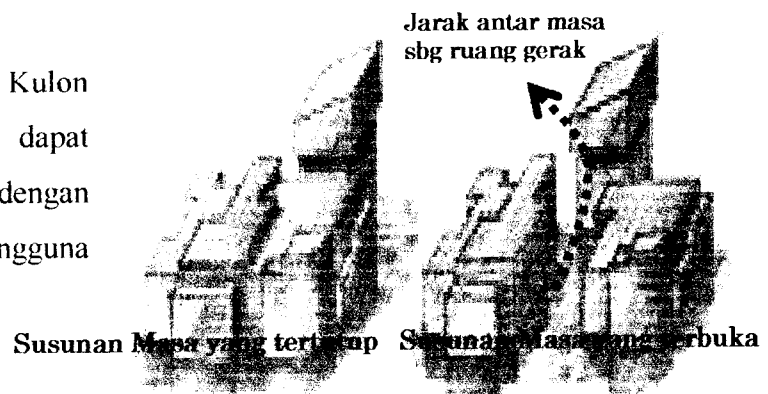
2.5.1.3 Tata Masa pada Gedung DPRD

Masa adalah ruang yang dibatasi oleh dinding, lantai dan bidang langit-langit dengan penyusunan pada bentuk yang menentukan volume ruang.³⁷ Pada bangunan perkantoran masa dibangun secara spekulatif maupun seragam untuk memberikan kesatuan pada bangunan atau kepemilikan.³⁸ Bangunan yang terdiri lebih dari satu masa harus dapat menciptakan lingkup kesatuan yang dapat diterapkan dengan penyeragaman bentuk masa atau dengan pengolahan geometri pada masa sehingga memberi satu kesatuan yang utuh pada bangunan agar publik dapat mudah dalam mengidentifikasi lokasi antar masa dalam bangunan. Masa merupakan wadah pengelompokan ruang yang disusun menurut fungsi dan hubungannya, susunan dan hubungan tersebut dapat menciptakan kesan dan karakter dari fungsi yang terbentuk.

³⁷ Franciis D. K. Ching, *Arsitektur Bentuk, Ruang dan Susunannya*, Erlangga, Jakarta, 1993, hal

³⁸ Ernst Neufert-Sunarto Tjahjadi, *Data Arsitek* jilid I, Erlangga, Jakarta, 1997, hal 6

Pada bangunan Gedung DPRD Kulon Progo susunan masa dapat menciptakan kesan terbuka dengan menciptakan respon gerak pengguna antar ruang dan masa.



Gbr. 2.11 Keterbukaan pada Gubahan Masa

Susunan masa pada Gedung DPRD sendiri dapat dicapai melalui susunan secara *terpusat*, *linier*, *radial* atau *kluster*, pada perancangan Gedung DPRD Kulon Progo susunan masa menggunakan kluster karena dengan susunan kluster akan lebih mudah dalam membentuk open space sebagai ruang gerak serta wujud penyesuaian pada luas site yang terbatas/ kecil

2.5.1.4 Tata Ruang Gedung DPRD

Ruang merupakan wadah yang disusun dalam masa bangunan. Pada ruang tersebut bentuk visual, kualitas cahaya, dimensi, dan skala bergantung pada batas-batas yang telah ditentukan oleh unsur-unsur bentuk dan jika ruang telah ditetapkan, dilingkupi, dibentuk dan diorganisir oleh unsur-unsur bentuk maka arsitektur menjadi nyata.³⁹ Pada bangunan perkantoran untuk menghubungkan satu departemen dengan departemen lainnya dalam suatu bangunan diperlukan hubungan ruang yang sesuai dengan hubungan kerja antar bagian agar denah ruang dalam bangunan tidak saling tumpang tindih.⁴⁰ Ruang dibagi menjadi dua yaitu *ruang luar* dan *ruang dalam bangunan*, ruang luar disusun dengan *mengelompokkan* atau *penzoningan* fungsi ruang atas kegiatan sedangkan ruang dalam disusun dengan pertimbangan *hubungan ruang* atas kegiatan terhadap fungsi. Dengan permainan unsur-unsur tersebut ruang dapat menciptakan kesan yang diinginkan, kesan terbuka dapat diciptakan dengan perpaduan lebar dan tinggi bangunan yang memberi respon gerak optimal pada ruang tersebut.

³⁹ Francis D. K. Ching, *Arsitektur Bentuk, Ruang dan Susunannya*, Erlangga, Jakarta, 1993, hal 108

⁴⁰ Ernst Neufert-Sunarto Tjahjadi, *Data Arsitek* jilid I, Erlangga, Jakarta, 1997, hal 11



Gbr. 2.12 Proporsi Keterbukaan pada Ruang

Keterbukaan pada ruang diciptakan dengan mengatur skala tinggi-lebar ruang yang dapat memberi kesan terbuka dengan pengolahan penutup ruang antar departemen yang menggunakan material transparan, sedangkan kewibawaan diciptakan dengan mengatur tingkat ketinggian lantai yang disesuaikan dengan hirarki kepentingan fungsi ruang yaitu ruang-ruang dengan fungsi yang lebih utama diletakkan pada lantai yang lebih tinggi.

2.6 Tinjauan Studi Banding

2.6.1 Gedung DPRD Sleman

Kesan Terbuka yang nampak pada ekspresi Gedung DPRD Sleman terlihat pada susunan dinding penutup depan yang dominan menggunakan material transparan. Hampir dari keseluruhan dinding yang melingkupi fasade menggunakan bukaan-bukaan yang diisi dengan material kaca, keterbukaan juga terlihat dari site plan dengan adanya open space ditengah bangunan.

Kesan Kewibawaan yang muncul tidak begitu terekspresi dari fasade yang terbentuk dari masa-asa yang rendah. Kewibawaan hanya diperlihatkan melalui tonjolan-tonjolan struktur yang diekspose diluar dinding penutup dan penggunaan atap model Joglo yang dipertinggi.

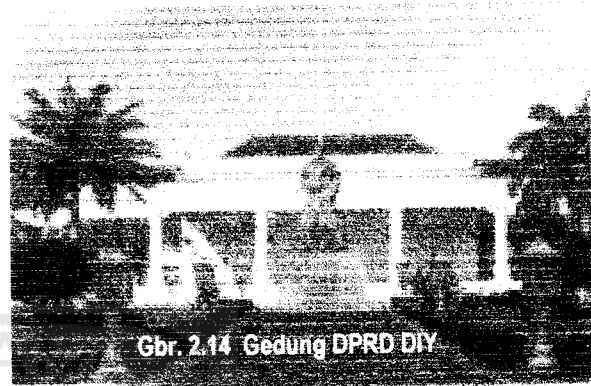


Symbolisasi pada bangunan tradisional terlihat dari penggunaan model atap Joglo dengan penerapan konstruksi bangunan sederhana bertingkat satu.

2.6.2 Gedung DPRD DIY

Kesan Terbuka tidak nampak pada ekspresi Gedung DPRD DIY, kesan yang diperlihatkan justru cenderung tertutup. Keterbukaan hanya terlihat pada masa sebelah utara yang orientasinya menghadap ke selatan yang dominan menggunakan kaca, serta open space yang diletakkan didepan bangunan sebagai ruang gerak

Kesan Kewibawaan yang terlihat muncul dari jajaran kolom bulat dengan dimensi yang besar yang diletakkan dengan cara repetisi didepan Hall utama.



Simbolisasi dari identitas **bangunan tradisional** tidak nampak dengan dominasi model bangunan Belanda, penerapan pada bangunan tradisional lebih terlihat pada transformasi perletakan pintu di samping kanan-kiri ruang Hall Utama.

2.6.3 Gedung DPRD Bantul

Kesan **Keterbukaan** dari bangunan Gedung DPRD Bantul tidak begitu terlihat, keterbukaan hanya ditunjukkan pada bukaan-bukaan bangunan sekretariat, sedangkan pada bangunan utama justru terlihat tertutup.

Kesan **Kewibawaan** yang timbul terlihat dari ekspos struktur rangka yang rapat dan masa bangunan yang tinggi dan besar dengan struktur bangunan modern.



Kesan pada **identitas bangunan tradisional** tersimbolkan melalui penggunaan atap model Joglo dengan ornament ukir Jawa pada entrance bangunan meliputi bagian pintu masuk dan kuncungan atap.